

## **Hubungan Kausalitas Mata Pelatihan “Aneka” Dengan Membangun Indonesia Bebas Korupsi**

**Siti Aminah**  
amimah0263@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan masih tingginya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dengan tingkat tertinggi pula oknum pelaku dari ASN, hal ini menggelitik Penulis untuk melanjutkan penelitian terdahulu dengan mencari apakah ada hubungan kausalitas mata pelatihan Nilai-nilai Dasar ANEKA dengan pola perilaku korupsi di kalangan ASN. Dengan asumsi bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional merupakan Calon-calun Pemimpin di masa yang akan datang yang akan berperan aktif dalam pembangunan pemberantasan korupsi dan menjadikan Indonesia Bebas Korupsi. Hal ini terlihat dari data yang disampaikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan membandingkan data semester I tahun 017 sampai dengan semester I tahun 2021 terdapat kenaikan yang sangat signifikan baik terhadap jumlah kasus, tersangka maupun jumlah kerugian keuangan negara, bahkan jika ditelisik lebih jauh lagi ternyata tindak pidana korupsi ditinjau dari pelaku korupsi ternyata ASN menduduki peringkat teratas dalam kasus korupsi. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif melalui observasi terstruktur dan mendalam dengan menggunakan data primer dan sekunder untuk mengembangkan nilai dan pengambilan kesimpulan berdasarkan data, dan berorientasi pada proses guna menjawab permasalahan yang ada terkait penyebab masih tingginya angka korupsi di Indonesia dengan mendasarkan pada adakah hubungan kausalitas antara sikap perilaku korupsi ASN dengan Penanaman Nilai-nilai Dasar PNS “ANEKA” dimasa yang akan datang. Dari hasil dan pembahasan dapat disampaikan bahwa terdapat hubungan kausalitas antara Nilai-nilai Dasar PNS “ANEKA” dengan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak responden dalam mewujudkan Indonesia Bebas Korupsi. Dengan kebaruan dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian yang penulis lakukan terdahulu dengan melakukan penambahan data responden baru dan dengan penggalan analisa yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Dapat disimpulkan bahwa Nilai-nilai Dasar PNS “ANEKA” yang diinternalisasikan secara benar pada saat seseorang mengikuti pelatihan dasar akan menjadi nilai diri yang dapat diaktualisasikan ke dalam kehidupannya sehari-hari, hal ini menunjukkan adanya hubungan kausalitas antara Nilai-nilai Dasar PNS “ANEKA” dengan Pemberantasan Korupsi dalam rangka mewujudkan Indonesia Bebas Korupsi.

Kata kunci : Korupsi. CPNS. ANEKA

## ***Causality Relationship Of “Aneka” Trainings By Building A Corruption-Free Indonesia***

### ***Abstract***

*This research is motivated by the high number of corruption cases that occur in Indonesia with the highest level of perpetrators from ASN, this intrigues the author to continue previous research by looking for a causal relationship between the training courses in ANEKA Basic Values and patterns of corrupt behavior among ASN. Assuming that Candidates for Civil Servants who are within the National Research and Innovation Agency are future Leader Candidates who will play an active role in the development of eradicating corruption and making Indonesia Corruption-Free. This can be seen from the data submitted by Indonesia Corruption Watch (ICW) by comparing the data for the first semester of 017 to the first semester of 2021, there is a very significant increase in both the number of cases, suspects and the amount of state financial losses, even if examined further. Again, it turns out that corruption is seen from the perpetrators of corruption, it turns out that ASN ranks at the top in corruption cases. This study uses a descriptive qualitative methodology through structured and in-depth observations using primary and secondary data to develop values and conclusions based on the data, and is process-oriented in order to answer existing problems related to the causes of the high corruption rate in Indonesia by basing on whether there is a causal relationship between ASN corruption behavior by inculcating the "VARIOUS" PNS Basic Values in the future. From the results and discussion, it can be conveyed that there is a causal relationship between the Basic Values of*

"ANEKA" PNS with the mindset, attitude, and pattern of actions of respondents in realizing a Corruption-Free Indonesia. The novelty of this research is that this research is a continuation of the research that the author did earlier by adding new respondent data and by extracting different analyzes from previous research. It can be concluded that the "ANEKA" PNS Basic Values that are properly internalized when a person participates in basic training will become self-values that can be actualized into their daily lives, this indicates a causal relationship between the "ANEKA" Civil Servant Basic Values. with the Eradication of Corruption in the context of realizing a Corruption-Free Indonesia.

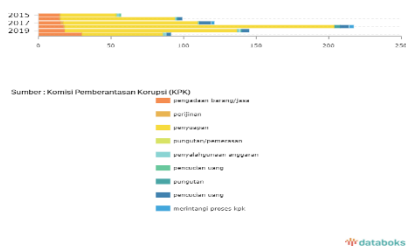
**Keywords:** Corruption, CPNS, ANEKA

## Pendahuluan

Ketika kita mencermati kondisi kekinian dengan maraknya kasus-kasus korupsi yang semakin menjadi di negara tercinta Indonesia ini, apa yang terbersit dalam benak kita. Apakah yang salah adalah tata aturannya yang kurang memberikan efek jera, atau sikap perilaku manusia saat ini yang sudah beranggapan bahwa korupsi itu sebuah "rejek", ataukah sikap perilaku oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Mengutip pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, Cahyo Kumolo dalam berita Katadata.com<sup>1</sup> bahwa terdapat lima titik rawan korupsi pejabat yaitu dana hibah dan bantuan sosial pajak dan retribusi, pengadaan barang dan jasa, hingga jual beli jabatan. Mengutip dari sumber yang sama terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang ditangani KPK selang waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 yaitu pengadaan barang dan jasa, perijinan, penyuapan, pungutan/pemerasan, penyalahgunaan anggaran, pungutan, pencucian uang, dan merintangi proses KPK.

Jenis Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani KPK (2015-2020)



Menyisik data yang dikeluarkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW)<sup>2</sup> untuk semester I tahun 2017 hingga tahun 2021 seperti pada gambar 1 di bawah ini dapat dikatakan bahwa pada semester I tahun 2017 terdapat 266 jumlah kasus dengan 500 tersangka dan nilai kerugian keuangan negara sebesar 1.8 trilyun, di tahun 2018 terdapat 139 jumlah kasus dengan 587 tersangka dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar 1.1 trilyun, semester I tahun 2019 terdapat 122 jumlah kasus dengan 351 tersangka dan kerugian keuangan negara sebesar 6.9 trilyun, semester I tahun 2020 terdapat 169 kasus dengan 250 tersangka dan kerugian keuangan negara mencapai 18.2 trilyun, dan di semester I tahun 2021 terdapat 209 kasus dengan 482 tersangka dan kerugian keuangan negara sebesar 26.8 trilyun.

Jika kita menyikapi data tersebut. Terlihat bahwa jika dibandingkan pada semester I tahun 2017 dengan semester I tahun 2018 terjadi penurunan jumlah kasus namun jumlah tersangka mengalami peningkatan walaupun jumlah kerugian keuangan negara juga mengalami penurunan sebesar 7 milyar, jika kita bandingkan kembali pada

1

<https://katadata.co.id/rezzaaji/berita/61435f2f24f7d/menteri-tjahjo-sebut-5-titik-rawan-korupsi-pejabat-termasuk-bansos>

2

<https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%20Semester%20I%202021.pdf>

semester I tahun 2018 dengan semester I tahun 2019 terdapat penurunan jumlah kasus dan jumlah tersangka namun mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari kerugian keuangan negara sebesar 5.1 trilyun. Perbandingan antara semester I tahun 2019 dengan semester I tahun 2020 terdapat penurunan dari jumlah kasus dan tersangka namun dari sisi kerugian keuangan negara kenaikan yang cukup tinggi yaitu 11.3 trilyun, begitu pula perbandingan antara semester I tahun 2020 dengan semester I tahun 2021 terdapat lonjakan baik dari jumlah kasus, tersangka maupun jumlah kerugian keuangan negara sebesar 8.6 trilyun.

Menyikapi data tersebut, dalam kondisi Indonesia dan dunia dilanda pandemic, justru tingkat korupsi semakin merajalela, disaat rakyat tercekik dengan kondisi keuangan yang morat marit akibat adanya pandemic, banyaknya tenaga kerja yang putus, sulitnya mencari uang untuk makan, namun tingkat korupsi justru semakin meningkat. Fenomena ini menandakan bahwa tingkat sikap perilaku para pelaku korupsi bukanlah mencerminkan seorang yang mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi, rasa kepedulian yang tinggi, tapi rasa keserakahan dirilah yang menjadikan Indonesia carut marut memberantas korupsi tiada henti.

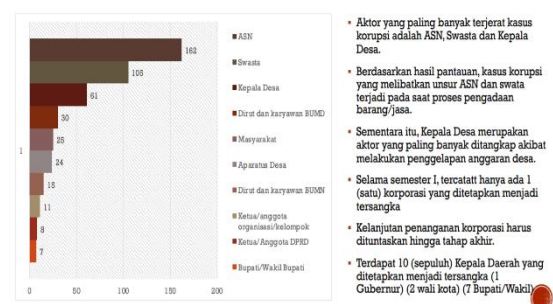
#### TREN PENINDAKAN KASUS KORUPSI SEMESTER I TAHUN 2017-2021



Gambar 1. Tren penindakan kasus korupsi tahun 2017-2020 Semester I.

Jika Penulis menisik lebih jauh lagi terhadap data yang dikeluarkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) masih dari sumber yang sama bahwa pelaku korupsi lebih banyak didominasi oleh Aparatur Sipil Negara, Swasta dan Kepala Daerah. Hal ini terlihat pada gambar 2. Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Aktor pada semester I tahun 2021.

#### PEMETAAN KASUS KORUPSI BERDASARKAN AKTOR SEMESTER I TAHUN 2021 (TOP 10)



Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia terhadap 1.201 responden PNS di lembaga-lembaga negara yang tersebar di 14 provinsi dan survei dilaksanakan pada periode 3 Januari-31 Maret 2021 bahwa korupsi yang terjadi di instansi pemerintah dalam penggunaan wewenang untuk kepentingan pribadi (26,2 persen), kerugian keuangan negara (22,8 persen), gratifikasi (19,9 persen), menerima suap (14,8 persen) serta penggelapan jabatan, perbuatan curang, pemerasan, juga bentuk lain (kurang dari 5 persen), dan hampir separuh responden sepakat bahwa perilaku koruptif paling sering terjadi di bagian pengadaan (47,2 persen).<sup>3</sup>

Mengutip pernyataan dari Komisioner KASN Bidang Pengawasan Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku dan Netralitas ASN, Arie Budiman mengungkapkan penurunan peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi pada tahun 2020 dari 85 menjadi 102.<sup>4</sup>

Dalam pemberitaan yang dilansir oleh media Merdeka.com pada Minggu, 18 April

2021, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa tak menampik masih mendapati PNS atau ASN yang terjerat korupsi. Tjahjo menyebut setiap bulan Kemenpan RB memecat tidak hormat para PNS korup. Lebih lanjut Cahyo menyampaikan, "Jujur kami tiap bulan rata-rata hampir 20 hingga 30 persen PNS yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus kami ambil keputusan untuk diberhentikan dengan tidak hormat," kata Tjahjo Kumolo dalam acara rilis survei LSI virtual. Tjahjo mengatakan, setiap kasus korupsi dibongkar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pasti ada PNS yang terlibat. Para PNS atau ASN itu selama proses hukum tidak langsung diberhentikan melainkan dinonaktifkan terlebih dahulu hingga proses hukum selesai.<sup>5</sup>

Kondisi ini menggugah Penulis untuk melakukan penelitian lanjutan dari penelitian singkat yang dilakukan pada tahun 2020 terkait dengan bagaimana peran dan Nilai-nilai dasar "ANEKA" yang ditanamkan saat mengikuti pelatihan dasar dapat menjadi jembatan bagi tegaknya keadilan dan pupusnya perilaku korupsi di kalangan PNS. Kita ketahui bersama bahwa Calon-calon Pegawai Negeri suatu saat nanti merekalah yang akan memimpin negeri ini. Oleh karena itu Penulis tergerak melakukan penelitian singkat dengan menambahkan data-data kekiniaan terhadap pola pikir Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi-Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam kurun waktu tahun 2020 dan tahun 2021 berdasarkan pada pengalaman Penulis saat memberikan materi Anti Korupsi dan Akuntabilitas pada Pelatihan Dasar CPNS tahun 2020 tahun pada agenda Sikap Perilaku Nilai-nilai Dasar PNS pada pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2021 yang baru lalu, bahwa masih terdapat peserta yang mempertanyakan hal

terkait dengan hasil dari penelitian terdahulu yang penulis telah lakukan di tahun 2020 ini. Dari banyaknya pertanyaan yang diajukan peserta tersebut, Penulis melakukan suatu observasi mendalam terhadap pola sikap perilaku setiap individu peserta pelatihan dasar, bahwa bagaimana peran dan Nilai-nilai dasar "ANEKA" yang ditanamkan saat mengikuti pelatihan dasar dapat menjadi jembatan bagi tegaknya keadilan dan pupusnya perilaku korupsi di kalangan PNS apakah ada hubungan kausalitas antara antara perilaku diri/individu seseorang yang mengakibatkan adanya perilaku tindak pidana korupsi dengan mata pelatihan Nilai-nilai Dasar PNS.

Dengan melihat kondisi kekinian, dimana banyak oknum PNS yang terlibat dalam perilaku korupsi dimana idealnya PNS dapat menjadi tulang punggung dalam pemberantasan tindak perilaku korupsi sehingga angka korupsi menurun dan mewujudkan Indonesia Maju Bebas Korupsi, oleh karena itu Penulis menarik benang merah rumusan masalahnya yang tertuang dalam pertanyaan penelitian yaitu adalah hubungan kausal antara mata pelatihan Nilai-nilai Dasar "ANEKA" dapat memberantas tindak perilaku korupsi di masa yang akan datang. Guna membatasi fokus penelitian, maka Penulis mendasarkan pada data-data penelitian dengan ditambahkan data kekinian pada lingkup perilaku Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi - Badan Riset Inovasi Nasional tahun 2020 dan tahun 2021, sebagai calon-calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang.

Nilai-nilai Dasar yang terkandung dalam "ANEKA" merupakan nilai dasar sikap perilaku seorang PNS yang mengedepankan integritas, akuntabilitas, profesionalitas sebagai tunas-tunas bangsa dan calon pemimpin bangsa. Dengan pembekalan Nilai-nilai dasar tersebut, diharapkan kelak

---

<sup>5</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/menpan-rb-sebut-tiap-bulan-ada-pns-dipecat-karena-korupsi.html>

saat mereka menjadi pemimpin bangsa dapat menjadi role model pemimpin yang berintegritas dan dapat meminimalisir tindak perilaku korupsi di lingkungan kerjanya.

Dari hasil penelusuran data dan informasi terkait penelitian terdahulu, dapat Penulis sampaikan bahwa belum ada satupun penelitian terkait tindak perilaku korupsi yang menghubungkan dengan nilai-nilai Dasar "ANEKA", oleh karena itu Penulis merasa yakin dan berkewajiban untuk melakukan penelitian dengan mencari hubungan kausalitas antara perilaku diri/individu seseorang yang mengakibatkan adanya perilaku tindak pidana korupsi dengan mata pelatihan Nilai-nilai Dasar PNS.

## Metode

Metodologi penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif melalui observasi terstruktur dan mendalam dengan menggunakan data untuk mengembangkan nilai dan pengambilan kesimpulan berdasarkan data, dan berorientasi pada proses guna menjawab permasalahan yang ada terkait penyebab masih tingginya angka korupsi di Indonesia dengan mendasarkan pada adakah hubungan kausalitas antara sikap perilaku korupsi ASN dengan Penanaman Nilai-nilai Dasar PNS "ANEKA" dimasa yang akan datang.

Dari permasalahan tersebut, Penulis kaitkan dengan bagaimana penerapan "ANEKA" sebagai nilai-nilai dasar PNS dapat mewujudkan Indonesia Maju Bebas Korupsi. Dalam penelitian singkat ini, penulis mendasarkan pemilihan metodologi penelitian dengan menggunakan metode kualitatif didasarkan pada pendapat para pakar/ ahli antara lain yaitu Bogdan & Biklen, s (1992: 21) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data narasi atau deskriptif, hal ini bisa berupa kalimat yang

terangkai dengan mengandung makna dan sesuai dengan objek yang diamati, dimana tujuan dari penelitian untuk memperoleh pemahaman umum terhadap kenyataan sosial dari sudut pandang responden. Sedangkan menurut Moloeng, (2007: 6) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif mempunyai tujuan untuk memahami fenomena apa yang dialami subyek penelitian yang dirangkai dalam bentuk kalimat dan dengan menggunakan metode secara ilmiah<sup>6</sup>, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara nilai-nilai dasar "ANEKA" dapat menumbuhkan Integritas sebagai Nilai Diri/Individu sehingga terwujud PNS yang berintegritas dan mewujudkan Indonesia Maju Bebas Korupsi.

Kedalaman ungkapan kalimat sebagai terjemahan dari data yang telah penulis gali, maka hasilnya akan semakin baik ketika itu tergambarkan dengan jelas dan penuh makna Oleh karena itu dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan pertanyaan langsung saat pembelajaran secara mendalam terhadap perilaku responden pada saat mengikuti pelatihan dasar dan juga dengan cara wawancara secara mendalam kepada responden terpilih yaitu para alumni peserta pelatihan dasar CPNS di lingkungan Kemenristek-BRIN tahun 2020 dan tahun 2021, dan kedua dengan menggunakan penelusuran data jurnal dan penelitian terdahulu terkait dengan korupsi di Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan

Responden dari penelitian ini adalah alumni Pelatihan Dasar Calon PNS di lingkungan Kemenristek-BRIN tahun 2020 terdiri dari Alumni Pelatihan Dasar CPNS Gol. III Angkatan I Tahun 2020 sebanyak 39 orang, dan Alumni Pelatihan Dasar CPNS Gol. II Angkatan I Tahun 2020 sebanyak 37 orang dan Alumni Pelatihan Dasar CPNS Gol. III Angkatan I Tahun 2021 sebanyak 12 orang, sehingga jumlah responden secara

---

<sup>6</sup> <https://meenta.net/pengertian-metode-penelitian-kualitatif/>

keseluruhan sebanyak 88 responden, dengan pertimbangan bahwa pada penelitian terdahulu yang telah penulis lakukan dengan menggunakan data Pelatihan Dasar Calon PNS kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dengan responden sebanyak 202 responden. Sehingga hasil dari penelitian ini adalah keberlanjutan penelitian terdahulu namun dengan sub tema yang berbeda sudut pandangnya, sehingga dapat menggambarkan secara utuh perolehan data, maka dapat Penulis gambarkan adakah hubungan kausalitas antara Nilai-nilai Dasar "ANEKA" dengan Pola Sikap Perilaku Anti Korupsi dimasa yang akan datang, sebagai berikut :

### 1. Nilai Dasar Akuntabilitas

Pada mata pelatihan Akuntabilitas, responden melalui pengamatan saat pembelajaran maupun pada saat diberikan pertanyaan terkait bagaimana komitmen seorang pegawai ketika diminta oleh pimpinan untuk membuat sebuah laporan pertanggungjawaban yang dilakukan secara tidak benar. Dari pertanyaan tersebut sebanyak 25 responden menyatakan bahwa akuntabilitas adalah sebuah pertanggungjawaban yang mencerminkan kinerja sebuah organisasi sehingga pertanggungjawaban harus dibuat serinci mungkin dan didasarkan pada fakta yang nyata saat itu, namun terdapat 5 responden yang menyatakan bahwa bagaimana seorang bawahan dapat menentang pimpinan atau atasannya ketika dia diberikan tugas, selebihnya sebanyak 58 responden menyatakan bahwa untuk memegang komitmen yang sudah dibangun saat mengikuti pelatihan dasar memang membutuhkan perjuangan yang tidak kecil namun ketika itu disampaikan dengan cara yang sopan dan mengedepankan rasa korsa bagi organisasi terhadap pimpinan maka pertanggungjawaban dapat dilakukan secara akuntabel.

Ketika pertanyaan yang sama pada penelitian terdahulu disampaikan kepada responden penelitian ini maka sebanyak 40 responden menyatakan setuju terhadap

pernyataan bahwa seorang PNS dituntut untuk menjadi PNS yang profesional dan akuntabel, sedangkan 44 responden menyatakan sangat setuju. Dan ketika pertanyaan dikaitkan dengan bagaimana mengatasi benturan kepentingan di dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai seorang PNS, diperoleh hasil bahwa 10 responden menyatakan mengedepankan instruksi atasan atau pimpinan, 55 responden menyatakan dengan segala resiko, menyampaikan dengan sikap sopan dan santun kepada atasan/pimpinan bahwa hal tersebut tidak dibenarkan secara aturan karena adanya konflik kepentingan sedangkan sisanya sebanyak 23 responden menyatakan bahwa dalam menyikapi kondisi tersebut akan menyampaikan akan menyikapi kondisi tersebut dengan membuat laporan yang benar secara aturan namun dilakukan secara tersamar sehingga tidak terjadi benturan antara bawahan dengan pimpinan.

Dari hasil Analisa deskriptif terhadap pola pikir responden, maka diperoleh simpulan bahwa sikap atau nilai diri atau nilai individu terbangun ketika seseorang telah menyadari dengan sepenuh hatinya bahwa untuk menjadi seorang PNS yang akuntabel harus diperjuangkan dan terus diperjuangkan dengan komitmen seutuhnya, sehingga ketika kelak mereka menjadi seorang pemimpin di unit organisasinya maka mereka akan mengedepankan integritas sebagai perwujudan dari PNS yang akuntabel.

Akuntabilitas seorang PNS tergambar ketika pertanggungjawaban setiap kegiatan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan dilakukan secara benar sesuai dengan kondisi nyata. Disinilah pentingnya penanaman nilai-nilai dasar akuntabilitas kepada calon pegawai negeri sipil, bagaimana mereka menginternalisasikan nilai-nilai tersebut sehingga dapat mengaktualisasikannya ke dalam sikap perilaku sehari-hari.

Dalam peran kepemimpinan, akuntabilitas merupakan konsep etika seorang pemimpin yang dituntut untuk dapat pertanggungjawaban pada setiap

yang dilakukannya baik itu berupa tindakan, keputusan organisasi, produk kebijakan termasuk pula di dalamnya administrasi publik pemerintahan, dan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab jabatannya dalam lingkup peran atau jabatan pemimpinnya.

## 2. Nilai Dasar Nasionalisme

Nilai Dasar Nasionalisme berpegang teguh pada Nilai-nilai Pancasila, dimana Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia wajib menjadi acuan dalam bersikap dan berperilaku dalam kondisi apapun. Hal ini sebagaimana tertuang dalam amanat Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, menyatakan bahwa "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa ....". Dari pernyataan tersebut mengandung makna yang sangat jelas bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa Bangsa Indonesia didirikan atas dasar landasan Pancasila dan bukan berlandaskan pada agama tertentu, hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 29 UUD 1945 ayat (1) yang berbunyi bahwa "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa", dan dalam ayat (2) berbunyi bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan menjalankannya sesuai dengan kepercayaannya". Oleh karena itu, Ketika seseorang berpegang teguh pada nilai-nilai Ketuhanan dapat memperkuat pembentukan karakter dan kepribadian bangsa yang amanah sesuai dengan agama kepercayaannya masing-masing, melahirkan etos kerja yang positif, dan memiliki kepercayaan diri untuk mengembangkan potensi diri dan kekayaan alam yang diberikan Tuhan untuk kemakmuran masyarakat.

Nilai-nilai Dasar Nasionalisme yang berlandaskan pada Pancasila benar telah menjiwai seluruh alumni pelatihan dasar, hal ini tampak pada respon terhadap pertanyaan bahwa 88 responden menyatakan sangat setuju bahwa internasionalisasi nilai-nilai dasar nasionalisme saat mengikuti pelatihan dasar yang diaktualisasikan pada sikap perilaku yang mendasari pola sikap dan pola tindak sehari-

hari dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang PNS dapat menjadi benteng yang kukuh kelak saat mereka menjadi seorang pemimpin dalam unit organisasinya.

Keberhasilan suatu organisasi dalam memberantas sikap perilaku korupsi didasarkan pada seorang pemimpin. Pemimpin yang mendasarkan sikap perilakunya pada nilai-nilai Pancasila akan menjadi seorang pemimpin yang bermoral, beretika, profesional dan menjadi tauladan yang baik di lingkungan kerjanya. Bermula dari hal-hal kecil dalam suatu unit organisasi namun ketika itu dilakukan diberbagai organisasi dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan mustahil Indonesia akan bebas dari korupsi.

## 3. Nilai Dasar Etika Publik

Etika Publik. Ketika kita berbicara tentang etika, maka yang terbersit dalam benak kita adalah norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku, maka etika publik sangat erat kaitannya dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku di lingkungan umum atau publik sehingga etika publik harus dipatuhi dalam rangka menjamin keterwujudan perdamaian dan ketenteraman dalam bersikap perilaku di masyarakat umum.

Responden dalam penelitian ini sangat setuju bahwa dalam menyikapi nilai-nilai dasar etika publik yang tercantum dalam Pasal 4 Undang Undang ASN no. 5 Tahun 2017 yang meliputi 1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila; 2. Berperilaku setia serta dapat mempertahankan UUD 1945; 3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak; 4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian; 5. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif; 6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur; 7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik; 8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah; 9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil

guna, dan santun; 10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi; 11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan Kerjasama; 12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai; 13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan 14. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir menyatakan secara keseluruhan bahwa sikap perilaku dengan menjunjung tinggi nilai dasar etika publik dapat menjadikan Indonesia Bebas Korupsi, walaupun dari pernyataan langsung dalam sesi pembelajaran beberapa responden menyatakan bahwa perilaku kasus korupsi lebih dipicu oleh oknum-oknum PNS yang notabene adalah para senior-senior PNS dan dicontoh oleh beberapa oknum PNS yang tidak bertanggungjawab. Sehingga responden sepakat bahwa pemberantasan korupsi dapat dilakukan ketika pemimpin memberikan contoh tidak melakukan sikap perilaku korupsi dan responden secara keseluruhan berkomitmen untuk menjadi agen-agen perubahan ketika responden menjadi seorang pemimpin dalam unit organisasinya.

Etika akan mempunyai makna jika diikuti oleh pelaku, sedangkan anti korupsi akan memiliki makna positif jika diawali dengan pelaku yang mempunyai komitmen dan integritas tinggi. Oleh karena itu etika publik harus dan wajib dijunjung tinggi oleh seorang Pegawai Negeri Sipil dalam fungsi dan jabatan apapun dia berada.

#### **4. Nilai Dasar Komitmen Mutu**

Komitmen mutu berorientasi pada tindakan yang menghargai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan kinerja dengan mengedepankan dan berorientasi pada mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dengan kata lain bahwa komitmen mutu adalah janji pada diri sendiri dan atau kepada orang lain yang tercermin dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak untuk menjaga mutu kinerja pegawai sehingga dapat terwujud kinerja organisasi. Pada penelitian terdahulu yang

dipertanyakan Kembali pada penelitian ini terkait dengan komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil, dipersepsikan oleh individu terhadap produk/jasa berupa ukuran baik/buruk, sehingga apapun yang menjadi tanggungjawab Pegawai Negeri Sipil secara optimal dilaksanakan untuk memberikan kepuasan kepada stakeholder, diperoleh pernyataan bahwa sebanyak 30 responden menyatakan akan berkomitmen dalam menjalankan tugas dan akan mencapai hasil dengan tidak melakukan pemborosan terhadap sumber daya dan mengedepankan efisiensi waktu dan anggaran, sebanyak 7 responden menyatakan bahwa akan berkomitmen untuk mewujudkan ide kreatif guna meningkatkan mutu pelayanan publik, sebanyak 20 responden menyatakan berkomitmen untuk senantiasa melakukan pekerjaan dengan arah dan tujuan untuk kualitas pelayanan dengan menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja, sedangkan sebanyak 31 responden menyatakan bahwa berkomitmen untuk senantiasa melakukan pekerjaan dengan arah dan tujuan untuk kualitas pelayanan dengan menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja, mencapai hasil tanpa pemborosan sumber daya dan hemat waktu, serta mewujudkan ide kreatifitas untuk meningkatkan mutu pelayanan publik.

Dari hasil pendalaman pola pikir, pola sikap, dan pola tindak responden dalam mewujudkan komitmen mutu para alumni pelatihan dasar dalam menjalankan tugas sehari-harinya di unit organisasinya masing-masing, bahwa banyak cara yang dapat dilakukan untuk senantiasa memperbaiki mutu layanan dari pegawai ASN kepada publik, dengan tetap menciptakan lingkungan kerja yang kondusif yang dikelola oleh seorang pemimpin transformasional, kinerja organisasi dengan berpegang teguh pada komitmen mutu akan terwujud.

Dengan tetap mengedepankan mutu dalam setiap kegiatan maupun aktivitas seorang Pegawai Negeri Sipil demi terwujudnya pelayanan publik sebagai bagian dari fungsi seorang ASN dapat meminimalisir perilaku korupsi di lingkungannya.

### 5. Nilai Dasar Anti Korupsi

Nilai dasar Anti korupsi adalah ujung tombak dari penelitian ini, dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah ada hubungan kausalitas antara mata pelatihan Nilai-nilai Dasar "ANEKA" dengan Pemberantasan Korupsi dalam rangka mewujudkan Indonesia Bebas Korupsi, yang berawal dari para calon-calon pemimpin bangsa yaitu para responden penelitian ini.

Dari hasil pendalaman melalui pengamatan langsung melalui pertanyaan-pertanyaan saat pemberian materi mata pelatihan Anti Korupsi diperoleh hasil Analisa bahwa:

- a. 100% responden setuju bahwa Nilai Dasar Anti Korupsi harus didengungkan secara terus menerus, sehingga terbentuk nilai individu menjadi individu berintegritas;
- b. 90% responden menyatakan bahwa komitmen integritas yang dibangun melalui pembelajaran mata pelatihan ANEKA akan terpatritasi dalam diri masing-masing responden, sedangkan 10% responden menyatakan bahwa tanpa dukungan pimpinan maka mustahil menciptakan unit kerja yang bebas korupsi, sehingga 10% responden lebih mengedepankan komitmen integritas harus diketahui pula oleh pimpinan sehingga pimpinan mempunyai peran dan tanggungjawab mutlak dalam menciptakan lingkungan yang bebas korupsi;
- c. 50% responden menginginkan bahwa Lembaga pelatihan tetap memberikan sosialisasi ke unit-unit kerja lainnya terkait dengan peran dan tugas ASN dalam memberantas korupsi, sedangkan 50% lainnya responden mengatakan bahwa sosialisasi dilakukan namun perlu dilakukan penanaman Unit Kerja

sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Mewujudkan Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM).

Badan Kepegawaian Negara sejak tahun 2018 telah bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menuntaskan permasalahan korupsi yang melibatkan Aparatur Sipil Negara, kerjasama tersebut tertuang dalam **Surat Deputy Bidang Pencegahan KPK Nomor: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018**, dengan menyepakati dua hal yaitu:

1. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (*inkracht*) dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi, dan
2. Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dari Jabatan yang terindikasi dugaan suap/pungli.

Menindaklanjuti komitmen tersebut,

BKN telah melayangkan imbauan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pusat maupun daerah melalui **Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/V 55-5 / 99 tanggal 17 April 2018** perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, namun kasus korupsi di kalangan Pegawai Negeri Sipil belum menjadi perhatian yang serius dalam penuntasannya. Hal ini terbukti dengan maraknya kasus-kasus yang menjerat Pegawai Negeri Sipil baik pusat maupun daerah.

Nilai diri adalah suatu nilai yang terbangun pada diri seseorang Ketika orang tersebut selalu menerima nilai-nilai positif dalam kehidupannya, semua bisa berawal dari keluarga, beranjak ke lingkungan dan bergeser ke lingkungan masyarakat atau organisasi. Seseorang yang telah memasuki lingkungan kerja sebagai Pegawai Negeri perlu dilakukan penanaman nilai-nilai dasar yang akan menjadi pedoman dan pegangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat serta pemersatu bangsa.

Ketiga fungsi ini tertuang dalam Undang Undang nomor 5 Tahun 20145 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksana kebijakan harus berlandaskan pada akuntabilitas individu, sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya dapat dipertanggungjawabkan secaraakuntabel. Pegawai Negeri Sipil sebagai pelayan public harus mampu mengemban amanat jabatannya dengan mengedepankan etika public dan komitmen mutu dalam memberikan pelayanan publik yang akuntabel. Pegawai negeri sipil sebagai perekat dan pemersatu bangsa harus mampu menjadikan dirinya sebagai tunas-tunas integritas bangsa dalam mengemban amanah jabatannya.

Diharapkan dari hasil dan pembahasan penelitian ini bahwa Nilai-nilai Dasar "ANEKA" perlu ditanamkan secara benar oleh para pengampu materi kepada seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil pada saat mengikuti pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri, sehingga dapat lebih dimaknai oleh para peserta pelatihan, hal ini tergambarkan dari respon sebagian responden yang menyatakan bahwa pentingnya memahami, mendalami, dan menanamkan nilai-nilai dasar "ANEKA" ini secara benar dan tepat sehingga saat diimplementasikan dalam sikap perilaku sehari-hari tergambarkan dengan benar.

Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pemimpin Bangsa di masa yang akan datang, oleh karena itu, jika Penulis mengaitkan hasil dari penelitian terdahulu yang penulis lakukan bahwa nilai-nilai dasar "ANEKA" yang ditanamkan saat mengikuti pelatihan dasar dapat menjadi jembatan bagi tegaknya keadilan dan pupusnya perilaku korupsi di kalangan PNS, maka hasil analisa dari penelitian ini jelas bahwa ada hubungan kausalitas antara mata pelatihan Nilai-nilai Dasar "ANEKA" dengan Pemberantasan Korupsi di lingkup tugasnya masing-masing. Di tangan mereka, Indonesia mampu meminimalisir perilaku korupsi dalam rangka mewujudkan Indonesia Bebas Korupsi.

## Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan kausalitas antara Nilai-nilai Dasar "ANEKA" dengan Pemberantasan Korupsi dalam rangka mewujudkan Indonesia Bebas Korupsi, dimana metodologi penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan menggunakan data hasil wawancara mendalam untuk mengembangkan nilai dan pengambilan kesimpulan berdasarkan data, dan berorientasi pada proses, sehingga dari hasil penelitian ini dapat Penulis simpulkan bahwa Nilai-nilai Dasar ANEKA yang diinternalisasikan secara benar pada saat seseorang mengikuti pelatihan dasar akan menjadi nilai diri yang dapat diaktualisasikan ke dalam kehidupannya sehari-hari, simpulan ini senada dengan simpulan pada penelitian terdahulu yang penulis lakukan dikarenakan adanya hubungan kausalitas antara Nilai-nilai Dasar "ANEKA" dengan Pemberantasan Korupsi dalam rangka mewujudkan Indonesia Bebas Korupsi ketika diinternalisasikan dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

## Rekomendasi

Dari penelitian ini, dapat penulis rekomendasikan bahwa penelitian ini perlu ditindaklanjuti dengan penelitian yang lebih mendalam lagi dengan responden yang berbeda dari Lembaga diklat lainnya, sehingga ada peta sebaran yang dapat menggambarkan secara utuh hasil penelitian ini dari berbagai responden terpilih lainnya.

## Daftar Pustaka

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

- 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).
- Undang Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1975 Tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya.
- LAN & BPKP. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Peraturan Kepala LAN no. 12 tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Kepala LAN no. 1 tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
- Buku:
- Raba, Manggaukang. 2006. Akuntabilitas, Konsep dan Implementasi. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Ermansjah Djaja. 2013. Memberantas Korupsi Bersama KPK. Kajian Yuridis UURI Nomor 31 Taun 1999 junco UURI nomor 20 Tahun 2001 versi UURI Nomor 30 Tahun 2002 juncto UURI Nomor 46 Tahun 2009. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo. 2016. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi). Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Chatrina Darul Rosikah, Dessy Marliani Listianingsih. 2018. Pendidikan Anti Korupsi. Kajian Antikorupsi, Teori dan Praktek. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Visnu Juwono. 2018. Melawan Korupsi. Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia 1945 - 2014. Jakarta: PT. Centro Inti Media.
- Mohammad Hatta. 2018. Menuju Gerbang Kemerdekaan. Untuk Negeriku. Jakarta: Buku Kompas.
- Bibit Samad Rianto. Esther Roseline. 2020. Koruptor Go To Hell. Gurita Korupsi di Indonesia. Yogyakarta: Andi.
- Siti Aminah. 2020. "ANEKA" Menggempur Koruptor. Sidoarjo: Nizamia Learning Center.
- LAN RI. 2015. Akuntabilitas. Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Gol. III. Jakarta: LAN RI.
- LAN RI. 2015. Nasionalisme. Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Gol. III. Jakarta: LAN RI.
- LAN RI. 2015. Etika Publik. Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Gol. III. Jakarta: LAN RI.
- LAN RI. 2015. Komitmen Mutu. Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Gol. III. Jakarta: LAN RI.
- LAN RI. 2015. Anti Korupsi. Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Gol. I, II, dan III. Jakarta: LAN RI.
- Siti Aminah. Indonesia Maju Dengan Integritas ASN. Sub Tema ASN 2024: Berkepribadian Indonesia, Profesional, dan Berkelas Dunia, dalam "Proceeding Ilmiah Peran Strategis Widyaiswara dalam Penguatan Kualitas Aparatur Sipil Negara pada Era Adaptasi Kebiasaan Baru. Prosiding PITNAS DPP IWI 2020. Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia (APWI)".
- Sumber lainnya:
- <https://katadata.co.id/rezzaaji/berita/61435f2f24f7d/menteri-tjahjo-sebut-5-titik-rawan-korupsi-pejabat-termasuk-bansos>
- <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%20Semester%20I%202021.pdf>
- <https://meenta.net/pengertian-metode-penelitian-kualitatif/>

